

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013)
- Anoraga, Pandji, Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing,  
(Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995)
- Asofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Rineka Cipta, 2001)
- Azhary, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya, (Jakarta:UI Press, 1995)
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Secara Efisien dan Efektif, Sustaining Partnership Edisi Pembangunan Infrastruktur Daerah (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017)
- Darmodiharjo, Darji dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Dikun, Suyono ed, Infrastruktur Indonesia – Sebelum, Selama, dan Pasca Krisis (Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003)

- H.S, Salim dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta:Rajawali Pers, 2008)
- Halim, Abdul, Analisis Investasi, (Jakarta:Salemba Empat,2005)
- Hayati, Tri, Harsanto Nursadi, Andhika Danesjvara, Hukum Administrasi Pembangunan Suatu Pendekatan Hukum dan Perencanaan, (Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)
- Isrok dan Dhiya Al Uyun, Ilmu Negara Berjalan Dalam Dunia Abstrak, (Malang:UB Press, 2010)
- Istianto, Bambang, Privatisasi dalam Model Public Private Partnership, (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2011)
- Joesoef, Erar, Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Sebagai Kontrak Bisnis Berdimensi Publik Antara Pemerintah Dengan Swasta (Investor) Dalam Proyek Infrastruktur (Jakarta: BP-FHUI, 2006)
- Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, (Yogyakarta:BPFE, 2003)
- Kairupan, David, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2013)
- Kamila, Anita, Aspek-Aspek Hukum Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik, (Jakarta:Keni Media, 2013)
- Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta:Kencana, 2010)

Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Indeks Kesejahteraan Rakyat, (Jakarta:Kemenko Kesra, 2013)

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (Jakarta:Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012)

Santoso, Budi, Aspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur Model BOT (Build Operate Transfer), (Solo:Genta Press, 2008)

Siagian, Sondang P, Administrasi Pembangunan (Jakarta:Bumi Aksara, 2014)

Sihombing, Jonker, Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, (Bandung:Alumni, 2010)

Sitorus, Santun R.P, Penataan Ruang, (Bandung:IPB Press, 2019)

Soedijana, F.X, Triyana Yohanes, H. Untung Setyardi, Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum), (Yogyakarta:Universitas Atma Jaya, 2008)

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:UI Press, 1986)

Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1986)

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta:Bumi Aksara, 2003)

Sukirno, Sadono, Makroekonomi Teori Pengantar, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012)

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003)

Tendelilin, Eduardus, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, (Yogyakarta: BPFE, 2001)

Tjokroamidjojo, Bintoro, Perencanaan Pembangunan, (Jakarta:Gunung Agung, 1977)

## **2. Jurnal**

Amtiran, Paulina. Y, dan Aldarine Molidya, “Pengelolaan Keuangan Negara”, Journal of Management, Volume 12, no. 2 (2020)

Artiningsih, A, N.C Putri, dan M. Muktiali, “Skema Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Non-Konvensional di Kota Semarang”, Jurnal Riptek Bappeda Kota Semarang, Volume 13, no. 2 (2019)

Hirawan, Susiyati B., “Pembiayaan Pembangunan Perkotaan Melalui Pemanfaatan Instrumen Keuangan”, Jurnal PWK, (1995)

Putri, Erika Sefila, dan Wisudanto, “Struktur Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Penunjang Pertumbuhan Ekonomi”, IPTEK Journal of Proceedings, Volume 3, No. 5 (2017)

Yuliawati, Eny, “Alternatif Skema Pembiayaan Dalam Pembangunan Infrastruktur Bandar Udara di Indonesia”, Jurnal Penelitian dan Perhubungan Udara, (2005)

### 3. Artikel Online

“Anggaran Infrastruktur Tahun 2021 Melonjak, Sri Mulyani: Menampung Yang Tertunda”, <https://www.dw.com/id/tahun-depan-anggaran-infrastruktur-melonjak/a-56015130>, (diakses pada 18 Februari 2021)

“Build, Operate, Transfer Agreement”, [www.shoutmixadvokadku.com/2006/BOT-Agreement](http://www.shoutmixadvokadku.com/2006/BOT-Agreement) (diakses pada 7 Mei 2021)

“Fasilitasi Pembiayaan Inovatif Non-APBN, PINA Center Private Investment Gelar Penandatanganan Perjanjian Pendahuluan Dengan Investor Dan Investee.”, <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/fasilitasi-pembiayaan-inovatif-non-apbn-pina-center-private-investment-gelar-penandatanganan-perjanjian-pendahuluan-dengan-investo/>, (diakses pada 5 Maret 2021).

“Guidelines For Infrastructure Development Trought BOT”, United Nations Industrial Development Organization, <https://www.unido.org/guidelines-infrastructure-development-through-build-operate-transfer-bot-projects> ( diakses pada 29 Agustus 2021)

“Isu Pembiayaan Infrastruktur Non-APBN dalam rangka implementasi Perpres 58/2017”, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Republik Indonesia, [https://www.bpsdm.pu.go.id%2Fcenter%2Fpelatihan%2Fuploads%2Fedok%2F2018%2F10%2Fcf6ce\\_PINA-Materi\\_PUPR.pptx&usg=AOvVaw0gDE8KszeczH2DfVNvuHZ1](https://www.bpsdm.pu.go.id%2Fcenter%2Fpelatihan%2Fuploads%2Fedok%2F2018%2F10%2Fcf6ce_PINA-Materi_PUPR.pptx&usg=AOvVaw0gDE8KszeczH2DfVNvuHZ1)  
(diakses pada 27 Agustus 2021)

“Kajian Public Private Partnership”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia,  
[http://www.fiscal.depkeu.go.id/webbkf/kajian/artikel\\_PPP\\_prap.pdf](http://www.fiscal.depkeu.go.id/webbkf/kajian/artikel_PPP_prap.pdf),  
(diakses pada 12 Januari 2021)

“Komitmen Pemerintah Dalam Penyediaan Infrastruktur: Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2016”, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/komitmen-pemerintah-dalam-penyediaan-infrastruktur-perpres-nomor-3-tahun-2016-dan-inpres-nomor-1-tahun-2016/#:~:text=Intinya%20dalam%20Perpres%20Nomor%203,ruang%20dan%20kepastian%20penyediaan%20lahan%2C> (diakses 11 Juli 2021)

“KPBU dan PINA Solusi Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia”, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas,  
<https://kppip.go.id/berita/bappenas-kpbu-dan-pina-solusi-pembiayaan-infrastruktur-di-indonesia/> (diakses 6 Mei 2021)

“KPBU dan PINA Solusi Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia”, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas,

<https://kppip.go.id/berita/bappenas-kpbu-dan-pina-solusi-pembiayaan-infrastruktur-di-indonesia/> (diakses 29 Agustus 2021)

“OJK:Aset Dasar Lebih Fleksibel, Instrumen DINFRA Lebih Menarik”,

<https://investasi.kontan.co.id/news/ojk-aset-dasar-lebih-fleksibel-instrumen-dinfra-lebih-menarik>, (diakses 26 April 2021)

“Panel Tahapan KPBUR”, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat,

[http://sim.ciptakarya.pu.go.id/bppspam/assets/assets/upload/Panel\\_Tahapan\\_KPBUR\\_BPPSPAM\\_IWF\\_\(uk\\_A2\).pdf](http://sim.ciptakarya.pu.go.id/bppspam/assets/assets/upload/Panel_Tahapan_KPBUR_BPPSPAM_IWF_(uk_A2).pdf), (diakses 7 Mei 2021)

“Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Indonesia Untuk Investasi”,

<https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/pentingnya-pembangunan-infrastruktur-indonesia-untuk-investasi>, (diakses 20 April 2021).

“Pilihan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Makin Luas”, Kementerian

Keuangan Republik Indonesia,

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/pilihan-pembiayaan-infrastruktur-daerah-makin-luas/>, (diakses 1 Mei 2021)

“PINA Menarik, Infrastruktur Membaik”, [https://investor.id/editorial/pina-](https://investor.id/editorial/pina-menarik-infrastruktur-membaik)

[menarik-infrastruktur-membaik](https://investor.id/editorial/pina-menarik-infrastruktur-membaik), (diakses 6 Mei 2021)

“Simak Beda KPBUR dan PINA Dalam Proyek Pembangunan

Infrastruktur”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d9188980c8>

[72/simak-beda-kpbu-dan-pina-dalam-proyek-pembangunan-infrastruktur?page=3](#), (diakses 16 Maret 2021)

“Skema PINA (Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran) Sebagai Alternatif Pembiayaan”,

[https://www.academia.edu/35437627/Skema PINA Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Sebagai Alternatif Pembiayaan dalam](https://www.academia.edu/35437627/Skema_PINA_Pembiayaan_Infrastruktur_Non_Anggaran_Sebagai_Alternatif_Pembiayaan_dalam),

(diakses 6 Mei 2021)

“The World Bank Annual Report 1994”, World Bank,

<http://documents1.worldbank.org/curated/en/567941468322429653/pdf/multi0page.pdf>, (diakses 30 April 2021)

“Variasi Instrumen Pembiayaan Infrastruktur Masih Terbatas”,

<https://www.neraca.co.id/article/89755/variasi-instrumen-pembiayaan-infrastruktur-masih-terbatas>, (diakses 6 Mei 2021)

#### **4. Skripsi, Thesis, dan Disertasi**

F. Nurmadimah, [Analisis Pemilihan Proyek Pengembangan Bandara UPT dengan Skema KPS](#), (Thesis, Fakultas Teknik Departemen Teknik Sipil Universitas Indonesia, 2012)

Oktorina, Ima, [Kajian Tentang Kerja Sama Pembiayaan Dengan Sistem \*Build, Operate, and Transfer\* Dalam Revitalisasi Pasar Tradisional](#), (Thesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010)



Pamungkas, B.T, Pengaruh Infrastruktur Ekonomi, Sosial, dan Administrasi Terhadap Pertumbuhan Provinsi-Provinsi di Indonesia, (Skripsi Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2009)

## **5. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan  
Pembangunan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan  
Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek  
Strategis Nasional

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan  
Jangka Panjang Nasional

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan  
Jangka Menengah Nasional

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah  
dengan Badan Usaha

## **6. Lain-lain**

Memori Akhir Tugas Menteri Pekerjaan Umum-Kabinet Indonesia Bersatu  
2004-2009, (Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,  
tanpa tahun)

Modul Sumber dan Pola Pembiayaan Infrastruktur, (Jakarta:Pusdiklat SDA

dan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, tanpa tahun)

Rajagukguk, Erman, “Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era

Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia” Pidato

Penguuhan Gurubesar dalam bidang Hukum pada Fakultas Hukum,

Universitas Indonesia

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia 2005-2025,

(Jakarta:Kementerian PPN/Bappenas, tanpa tahun)